Journal of Administration, Governance, and Political Issues
Volume: 1, Nomor 2, July-Desember 2024, *Hal*: 65-74

Pengurangan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Tanggap Bencana: Studi Kasus Program SINAR PELITA di Kabupaten Aceh Tamiang

Nurseno Dwi Putranto, Khairunnisa Diltha, Dzakyansyah Naufal Isda
Pertamina EP Rantau, Jl. Jakarta No.1, Komplek Pertamina Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 1 July 2024
Revised : 20 September 2024
Accepted : 25 September 2024

KEYWORDS
Inclusive Disaster Management; Disability Involvement; SINAR PELITA Program; Early Warning System (EWS)

CORRESPONDENSI
Nama : Nurseno Dwi Putranto
Email : nurseno.putranto@pertamina.com

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

This study aims to reduce discrimination against persons with disabilities in disaster response in Aceh Tamiang Regency through the Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT Pertamina EP Rantau, known as the SINAR PELITA Program. The program implements an inclusive and responsive disaster management system by actively involving persons with disabilities. The research adopts a qualitative phenomenological approach using purposive sampling from members of the Digdaya Task Force, which is a key component of the SINAR PELITA Program. Key initiatives under this program include the formation of the Digdaya Task Force, emergency productive economic activities, and the use of Smart Current Meters and solar-powered systems as an Early Warning System (EWS). The findings indicate that the SINAR PELITA Program has successfully enhanced accessibility and reduced discrimination against persons with disabilities during disasters. In conclusion, the active participation of persons with disabilities in disaster response through the Digdaya Task Force is a significant step toward fostering a more inclusive environment. The program is expected to continue evolving, extending its benefits through initiatives such as the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) based on food crops, the digitalization of program data, and strengthening the Digdaya Task Force as agents of change within the community.

Pendahuluan

Dampak dari terjadinya bencana alam menimbulkan korban jiwa yang tinggi di dunia terutama pada kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilaporkan sangat rentan menjadi korban, baik terluka ataupun meninggal akibat bencana dengan jumlah yang signifikan (Dawud, 2024). *The International Day for Disaster Reduction* tahun 2013 berfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas, menyadari bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok paling berisiko selama bencana. Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat adanya hambatan dan kebutuhan yang dialaminya, seperti dari aspek fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Berbagai hambatan yang terjadi menyebabkan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang pada umunya tersedia dalam penanggulangan bencana (Hanjarwati, 2023; Stough & Kelman, 2018).

Dalam menghadapi isu sosial di masyarakat, terdapat keterkaitan antara bencana alam dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep yang marak diterapkan adalah *Triple*

Bottom Line, di mana mengacu pada tiga aspek utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu *Profit, People* dan *Planet*. Ketiga elemen ini saling terkait dan harus diintegrasikan dalam strategi perusahaan, terutama ketika menghadapi isu-isu seperti bencana alam. Integrasi konsep *Triple Bottom Line* dalam strategi CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, tidak hanya dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta lingkungan (Kospa, 2020).

Saat terjadi bencana ataupun pasca bencana, biasanya didominasi oleh kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Dalam UURI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyandang disabilitas diatur untuk mendapat perhatian khusus dan prioritas dalam upaya penanggulangan risiko bencana (pasal 55 ayat 1). Selain itu terdapat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Salah satu pasal menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan sesuai aspirasi penyandang disabilitas, semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (Kyoo, 2016).

Para penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan karena keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Hal tersebut juga dapat dilihat pada realita sosial yang diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam tanggap kebencanaan (Wahyuningsi et al., 2021). Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 19 Desember 2022 terdapat 987 laporan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas. Di mana 84 kasus kekerasan terhadap laki-laki disabilitas (8,5 %) dan 786 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas (91,5 %). Keterbatasan fisik yang penyandang disabilitas miliki diperparah oleh minimnya fasilitas umum yang terdapat di masyarakat. Selain itu, minimnya akses penyandang disabilitas terhadap informasi aktual dan valid juga turut menjadi kendala ketika mereka menghadapi bencana. Keadaan ini dapat tergambar jelas melalui realita sosial yang tepatnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh pada 2022, orang dengan disabilitas di Provinsi Aceh berjumlah 18.680 jiwa.

Bencana alam yang kerap kali terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang adalah bencana banjir. Banjir diperkirakan terjadi di setiap akhir tahun ketika musim penghujan. Berdasarkan *Rapid Environmental Impact Assessment (REA) in Disaster* pada tahun 2023, risiko banjir di Aceh Tamiang masuk kategori sedang-tinggi pada 12 kecamatan dengan luas potensi bahaya 70.722 ha. Akibat dari bencana ini, banyak kegiatan lumpuh total. Akses transportasi masyarakat terganggu, sebagian besar masyarakat mengeluhkan kondisi tempat tinggal mereka yang terendam air. Selain itu, masyarakat juga sulit mengakses air bersih dan makanan bergizi. Banjir tahunan ini juga sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari kelompok rentan, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Hal yang sangat

dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah tingginya tingkat diskriminasi sosial saat terjadinya bencana. Hal tersebut terjadi karena minimnya data konkret disabilitas, informasi kebencanaan yang tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana, dan kebijakan pemerintah belum fokus terhadap pengurangan bencana yang inklusif (Yuwanto, 2023).

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pertamina EP Rantau Field sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan untuk melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sekitar lokasi operasional perusahaan, khususnya wilayah Ring I, melakukan upaya untuk memutus mata rantai diskriminasi dan melibatkan para penyandang disabilitas pada tanggap kebencanaan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan mandat dari Perka No 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Penyandang disabilitas sudah saatnya tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, namun juga aktor yang terlibat langsung dalam program (Probosiwi, 2018).

Pencantuman aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh tahap manajemen bencana, khususnya dalam tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan efektivitas upaya tanggap darurat dan *recovery* yang dilakukan pemerintah. Upaya Pertamina EP Rantau Field adalah dengan melakukan pengembangan program yang bernama "SINAR PELITA" atau Sistem Inklusif Dan Responsif Pelibatan Disabilitas Dalam Tanggap Bencana yang di dalamnya terdapat inisiasi kelompok Satuan Tugas Difabel Tanggap Bencana yang diberi nama "Satgas DIGDAYA" atau Satuan Tugas Difabel Siaga Tanggap Bencana dan Berdaya. Satgas DIGDAYA terdiri dari berbagai jenis disabilitas, antara lain adalah tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna grahita. Kelompok Satgas ini harapannya mampu menjadi *agent of change* ataupun *role model* bagi masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Basri (2020), dengan judul "*Simulasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Bagi Penyandang Disabilitas di Sekolah Luar Biasa Aceh Timur*", mengungkapkan bahwa kegiatan simulasi dan pelatihan mitigasi bencana merupakan alternatif solusi terhadap penyandang disabilitas dalam mengatasi bencana yang timbul di wilayah Aceh Timur, serta memberikan pengetahuan tambahan kepada penyandang disabilitas tentang pentingnya menghadapi kewaspadaan bencana yang kerap terjadi di wilayah Aceh Timur. Berdasarkan penelitian tersebut, hanya berfokus pada manajemen mitigasi dan tanggap bencana saja, tidak ada penjabaran lebih lanjut terkait pemulihan setelah terjadinya bencana.

Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Sakina (2019), dalam judul "*Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta*", mengungkapkan bahwa tingginya kualitas penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok Difabel Tanggap Bencana (DIFAGANA) DIY tidak cukup jika hanya dilandaskan pada pemberian bantuan material (*charity based approach*) berdasar dari semangat belas kasihan, tapi juga sangat ditentukan oleh pendekatan hak asasi manusia yang mengakomodasi kekuatan modal sosial penyandang

disabilitas (*human rights based approach*). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab realita di masyarakat, bahwasanya penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya juga mampu untuk terlibat secara aktif sebagai *agent of change* pada tanggap kebencanaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah memperkenalkan Program SINAR PELITA dan Satgas DIGDAYA sebagai salah satu pelopor sistem responsif yang terintegrasi terhadap bencana untuk penyandang disabilitas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sosial yang inklusif serta ramah bagi disabilitas, dan meningkatkan peran *stakeholder* untuk bekerjasama dalam menciptakan program ataupun kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2018). Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu mencocokkan dan juga memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Sehingga apa yang ada di lapangan nantinya akan dicocokkan dan dipahami dengan peristiwa yang berkaitan. Fenomena yang dialami oleh subjek penelitian maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, tindakan yang kemudian dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara alamiah. Jen

is data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian serta melakukan observasi non partisipatif atau pengamatan langsung oleh peneliti dalam pelaksanaan program. Data sekunder atau studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data pendukung dari program, artikel, ataupun sumber sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal lain yang ingin peneliti investigasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan sampel berupa *purposive sampling* berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Adapun pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kriteria-kriteria berikut ini:

1. Anggota Kelompok Satuan Tugas Difabel Tanggap Bencana
2. Subjek setidaknya pernah mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana
3. Jenis disabilitas fisik dikhususkan pada tuna daksa, yaitu angggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas individu yang bersangkutan.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan masyarakat mempunyai misi memandirikan masyarakat dalam proses keswadayaan sumber daya kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan dan pilihan hidup dan

mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka. PT Pertamina EP Rantau Field selaku penggerak pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja operasinya, berkomitmen melaksanakan pemberdayaan ini dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bawah pedoman Undang-undang negara, visi misi dan Tata Kelola ataupun Standarisasi CSR yang dirancang oleh perusahaan untuk menjamin pelaksanaannya.

Menurut Munawar (2011), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan *(power)* dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung *(disadvantaged).* Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yaitu kekuasaan *(power)* dan kurang beruntung *(disadvantaged)*.

Sebagai negara yang menganut pluralisme kesejahteran, upaya untuk menanggulangi kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga masyarakat dan tidak terkecuali sektor privat. Sektor privat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dewasa ini kegiatan CSR banyak diintegrasikan sejak awal kedalam bisnis perusahaan, di mana kegiatan produksi perusahaan mengedepankan adanya keseimbangan antara keuntungan, lingkungan dan masyarakat. PT Pertamina EP Rantau Field telah membuktikan komitmennya terhadap pelaksaan program CSR yang berkelanjutan melalui serangkaian program yang telah disusun secara sistematis dan disesuikan dengan kebutuhan masyarakat. Program CSR PT Pertamina EP Rantau mencangkup empat isu, yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Keempat isu ini dijawab melalui berbagai program pemberdayaan. Melalui hasil pemetaan sosial yang dilakukan di beberapa desa RING I dan diskusi dengan pemerintah maka perusahaan menangkap permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat. Selain melalui pemetaan sosial yang dilakukan oleh pihak ketiga, perusahaan melalui *Community Development Officer* melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, menggali kebutuhan dan potensi yang ada dan merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

Kehadiran PT Pertamina EP Rantau Field ditengah masyarakat turut memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di beberapa aspek kehidupan. Salah satunya di bidang sosial dan lingkungan, melalui Payung Program Sistem Inklusif Dan Responsif Pelibatan Disabilitas Dalam Tanggap Bencana (SINAR PELITA). Penentuan fokus pada program ini merujuk pada tingginya tingkat diskriminasi pada para penyandang disabilitas ketika terjadinya bencana, dan perlu adanya upaya inklusivitas kepada masyarakat penyandang disabilitas. Dalam menjalankan payung program tersebut, Pertamina memiliki tiga program unggulan, yaitu inisiasi Kelompok Satgas DIGDAYA, Usaha Ekonomi

Produktif Darurat Bencana, dan Penggunaan *Smart Current Meter* sebagai *Early Warning* System (EWS) serta PLTS Konversi Tetes Air Hujan.

Program SINAR PELITA merupakan program CSR PT Pertamina EP Rantau Field yang berfokus pada pelibatan penyandang disabilitas pada tanggap bencana. Isu utama yang menjadi fokus pada program ini adalah diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas saat terjadinya bencana. Program SINAR PELITA dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, melalui pelibatan dari seluruh anggota Kelompok Satgas DIGDAYA yang berasal dari 12 kecamatan. Pelaksanaan program ini juga berbasis kategori dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 Ayat (7), yaitu tentang upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan mereka dalam pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi indivitu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Awal inisiasi Program ini adalah sejak tahun 2023 dengan melakukan *assessment* dengan beberapa stakeholder terkait. Setelah itu pada tahun 2024, CDO melakukan *Focus Group Discussion* yang mengundang perwakilan dari Yayasan Disabilitas Aceh Tamiang dan *stakeholder* terkait untuk mendiskusikan program tanggap bencana inklusif dan tujuan program kedepan. Saat ini Satgas DIGDAYA aktif dengan 12 anggota kelompok. Kegiatan program dilakukan di *inclusive shelter,* tempat aman dan ramah difabel yang diberikan PT Pertamina EP Rantau kepada penyandang disabilitas.

Sejak inisiasi program pada tahun 2023, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran para penyandang disabilitas pada tanggap bencana. Hal ini diperlukan untuk menyiapkan secara sungguh-sungguh agar penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan tanggap mengenai masalah, kebutuhan, potensi dan cara-cara dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Wibowo et al., 2017). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Inisiasi dan Pembentukan Kelompok Satgas DIGDAYA
   Pada awal inisiasi kelompok Satgas DIGDAYA tahun 2023, kegiatan awal yang dilakukan adalah *assessment* dan *sampling* para penyandang disabilitas yang tempat tinggalnya tersebar di 12 kecamatan. Tahapan *assessment* dan *sampling* anggota dilakukan bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) melalui pengisian kuesioner. Setelah itu, dilakukan pembentukan kelompok, dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dasar kebencanaan, pelatihan *basic life support*, hingga simulasi keadaan darurat bencana banjir. Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan identitas kelompok, juga dilakukan pengadaan atribut personal untuk seluruh anggota kelompok Satgas DIGDAYA.
2. Usaha Ekonomi Produktif Darurat Bencana
   Dalam hal tanggap bencana, kegiatan yang dilaksanakan tidak serta merta hanya berpusat pada bidang sosial dan lingkungan saja, tetapi juga berkaitan dengan

kegiatan ekonomi. Pertamina EP Rantau Field turut berupaya dalam penambahan pendapatan bagi para penyandang disabilitas. Usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan antara lain adalah inklusi *coffee*, bengkel dan *doorsmeer* difabel, budidaya lele, dan tanaman pangan darurat bencana. Seluruh unit usaha tersebut dijalankan oleh beberapa kelompok penyandang disabilitas yang setiap orangnya memiliki kemampuan yang berbeda. Sub unit usaha inklusi *coffee* dan bengkel serta *doorsmeer* difabel telah dibentuk sejak tahun 2021. Hingga saat ini kedua sub unit tersebut masih berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan pendapatan bagi para anggota kelompok penyandang disabilitas. Sub unit usaha budidaya lele dan tanaman pangan darurat dijalankan oleh Satgas DIGDAYA, yang kemudian bekerja sama dengan Posyandu Kenari (Program CSR Pertamina EP Rantau Field) untuk mengolah bahan baku ikan menjadi diversifikasi produk turunan seperti olahan abon lele dan biskuit darurat bencana (BDB) sebagai produk yang bernilai guna sebagai pangan darurat bencana.

3. Penggunaan *Smart Current Meter* sebagai *Early Warning System (EWS)* serta PLTS Konversi Tetes Air Hujan

   Smart Current Meter sebagai *Early Warning System (EWS)* adalah sebuah teknologi terpadu yang memiliki manfaat dalam mitigasi bencana. *Smart Current Meter* bertujuan untuk mengukur debit aman air yang terdapat di 2 lokasi, yaitu hulu sungai dari Aceh Tamiang dan *inclusive shelter*. Alat ini dilakukan pemantauan oleh anggota Kelompok Satgas DIGDAYA yang berada di hulu. Jika debit air telah melewati batas aman yang telah ditetapkan, maka akan muncul pemberitahuan bahwasanya akan ada potensi terjadi banjir. Alat ini diharapkan mampu menjadi alat informasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk melakukan mitigasi bencana bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kehidupan sehari-hati, juga dalam mengakses teknologi, informasi dan komunikasi. Informasi kini menjadi kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan diri (Utami, 2015). PLTS Konversi Tetes Air Hujan adalah sebuat unit pembangkit listrik yang mampu mengonversi air hujan menjadi sumber listrik. Alat ini akan sangat berguna ketika musim hujan datang. Minimnya sinar matahari yang diserap oleh PLTS ketika sedang hujan, menjadikan air hujan sebagai sumber listrik utama. Alat ini dilakukan pemantauan oleh Satgas DIGDAYA setiap bulannya, agar tidak terjadi masalah saat mengoperasikannya.

Program SINAR PELITA merupakan integrasi dari beberapa bidang yang secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi masyarakat secara luas. Berikut rencana kerja dan implementasi pada program ini:

Tabel Rencana Kerja dan Implementasi Program SINAR PELITA

Nama Kegiatan	Implementasi	
	Perencanaan	Implementasi
Peningkatan kapasitas kelompok Satgas DIGDAYA	Meningkatnya pemahaman Satgas DIGDAYA dalam manajemen dasar kebencanaan serta simulasi bencana	Satgas DIGDAYA telah memahami manajemen dasar kebencanaan serta simulasi bencana
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Adanya diversifikasi produk unggulan	Diversifikasi produk baru pada Biskuit Darurat Bencana (BDB) dan Olahan Abon Lele
Penggunaan *Smart Current Meter* sebagai *Early Warning System (EWS)* serta PLTS Konversi Tetes Air Hujan	Meningkatnya pemahaman dan penggunaan alat dari seluruh anggota Satgas DIGDAYA.	50% dari anggota kelompok Satgas DIGDAYA mampu mengoperasikan alat yang ada
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi banjir untuk mitigasi bencana.	50% masyarakat dari 12 kecamatan mendapatkan informasi banjir untuk mitigasi bencana.

Sejak diinisiasi pada tahun 2023, fokus pelibatan para penyandang disabilitas pada tanggap bencana dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2023 berfokus pada inisiasi dan pembentukan kelompok Satgas DIGDAYA. Tahun 2024 berfokus pada peningkatan kapasitas, peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan penggunaan EWS dan PLTS. Program SINAR PELITA dilakukan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring evaluasi. Kedepannya, program ini akan terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain agar memiliki kebermanfaatan bagi semua orang.

Simpulan

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah yang sangat rawan akan terjadinya bencana alam di setiap tahunnya. Para penyandang disabilitas yang merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan memiliki akses yang minim untuk mendapatkan informasi dan bantuan kebencanaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pertamina EP Rantau Field melakukan upaya, yaitu dengan cara menginisiasikan dan membentuk kelompok Satgas DIGDAYA. Peran dan keterlibatan aktif dari para penyandang disabilitas menjadi satu langkah baik untuk kedepannya. Dengan mengusung sistem kebencanaan yang inklusif dan responsif, Pertamina EP Rantau Field menuangkannya ke dalam Program SINAR PELITA. Program tersebut merupakan program integrasi dari beberapa kegiatan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pertamina EP Rantau Field adalah Inisiasi dan Pembentukan Kelompok Satgas DIGDAYA, Usaha Ekonomi Produktif Darurat

Bencana, dan Penggunaan *Smart Current Meter* sebagai *Early Warning System* (EWS) serta PLTS Konversi Tetes Air Hujan. Upaya dalam menurunkan tingkat diskriminasi bagi para penyandang disabilitas, khususnya pada tanggap bencana selayaknya dilakukan secara berkelanjutan. Program SINAR PELITA terus dikembangkan dengan memperluas nilai kebermanfaatan sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa rencana pengembangan keberlanjutan pada program ini adalah pengembangan UMKM berbasis tanaman pangan untuk Posyandu Kenari, digitalisasi pendataan program, dan Satgas DIGDAYA menjadi *agent of change* bagi masyarat.

Daftar Pustaka

Basri, T. H., & Suwardi, A. B. (2020). Pengetahuan kesiapsiagaan kebencanaan tsunami dan gempa bumi pada siswa penyandang disabilitas kabupaten Aceh Timur. *Seminar Nasional …*, *1*, 450–456. http://publikasi.fkip-unsam.org/index.php/semnas2019/article/view/115

Dawud, M. (2024). Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi penyandang disabilitas. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, *1*(2). https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.385

Kyoo, Ha. M. (2016). Inclusion of people with disabilities, their needs and participation, into disaster management: A comparative perspective. *Environmental Hazards*, *15*(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/17477891.2015.1090387

Hanjarwati, A. (2023). Faktor-Faktor Internal Resiliensi Penyandang Disabilitas Baru Korban Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Diy. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah …*, *20*(1), 35–56. https://doi.org/10.14421/hisbah.2023.201-03

Kospa, Dara H. S. (2020). Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT.Antam Tbk). *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik*, *9*(1). https://doi.org/10.36982/jtg.v10i2.1725

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah CIVIS: Vol. I* (Issue 2).

Probosiwi, Ratih. (2018). Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana Di Yogyakarta. *Journal of Health Education*, *4*(2), 13–22.

Sakina Widya Aulia, Setyowati Yuli, A. O. (2019). Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta. *The 6th Annual Scientific Meeting On Disaster Research*.

Stough, L. M., & Kelman, I. (2018). People with Disabilities and Disasters. *Handbooks of Sociology and Social Research*, 225–242. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_12

Wahyuningsi, P., Moita, S., & Tanzil, T. (2021). UPAYA PENYANDANG DISABILITAS FISIK TERHADAP AKSES PEKERJAAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL EKONOMI (Studi Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tenggara). *WELL-BEING: Journal of Social Welfare*, *2*(1).

https://doi.org/10.52423/well-being.v2i1.20001

Wibowo, F. G., Aini, Q. H., Sunardi, A. E., Layyinah, N. U., & Machdum, S. V. (2017). Identifikasi Potensi, Kebutuhan, Dan Permasalahan Berdasarkan Hubungan Interaksi Masyarakat Dengan Lingkungannya Yang Rentan Terhadap Bencana Longsor. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *18*(2). https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v18i2.104

Yuwanto, L. (2023). Faktor Penghambat Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Partisipasi Pengurangan Risiko Bencana. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, *3*(2), 16–32. https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.131